



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pengawasan pembangunan perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pasal 5 ayat (1), Rencana Kerja Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Pacitan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2016 yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun di Kabupaten Pacitan.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, berisi program prioritas dan kegiatan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017, digunakan sebagai :

- a. Pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan RAPBD Tahun Anggaran 2017; dan

b. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2017.

**BAB IU
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 26 - 5 - 2016

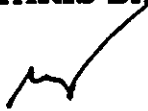
BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 14

Daftar Isi

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	3
1.4 Sistematika Penyusunan RKPD	4
1.5 Maksud dan Tujuan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU.....	7
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	7
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	80
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	182
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	245
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	245
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	252
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN	258
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	262
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2017	265
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	278
BAB VI PENUTUP	376

Daftar Tabel

Tabel.T-II.1	Tabel Luas Wilayah Per Kecamatan	8
Tabel.T-II.2	Luas Kawasan Hutan Menurut Jenisnya	10
Tabel.T-II.3	Luas Kawasan Pertanian	12
Tabel.T-II.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2014	21
Tabel.T-II.5	Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	22
Tabel.T-II.6	Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2014	23
Tabel.T-II.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013 dan 2014	24
Tabel.T-II.8	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2013 dan 2014	24
Tabel.T-II.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan 2014	26
Tabel.T-II.10	Angka Partisipasi Kasar (APK)	30
Tabel.T-II.11	Angka Partisipasi Murni (APM)	31
Tabel.T-II.12	Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2010-2015	32
Tabel.T-II.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2015	33
Tabel.T-II.14	Jenis Kesenian dan Kepurbakalaan di Kabupaten Pacitan	33
Tabel.T-II.15	Indikator Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Bidang Kebudayaan Tahun 2010 s/d 2014	34
Tabel.T-II.16	Indikator Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Bidang Pemuda dan Olah Raga Tahun 2010 s/d 2014	34
Tabel.T-II.17	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Pendidikan Tahun 2010 s/d 2015	36
Tabel.T-II.18	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Kesehatan Tahun 2010 s/d 2015	43
Tabel.T-II.19	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2010 s/d 2015	46
Tabel.T-II.20	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Perumahan Tahun 2010 s/d 2015	48
Tabel.T-II.21	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Penataan Ruang Tahun 2010 s/d 2015	49
Tabel.T-II.22	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2010 s/d 2015	50
Tabel.T-II.23	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Perhubungan Tahun 2010 s/d 2015	52
Tabel.T-II.24	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010 s/d 2015	53
Tabel.T-II.25	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Pertanahan Tahun 2010 s/d 2015	54
Tabel.T-II.26	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Kependudukan Tahun 2010 s/d 2015	55
Tabel.T-II.27	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010 s/d 2015	56
Tabel.T-II.28	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2010 s/d 2015	57
Tabel.T-II.29	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Sosial Tahun 2010 s/d 2015	58
Tabel.T-II.30	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2010 s/d 2015	59
Tabel.T-II.31	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 s/d 2015	59
Tabel.T-II.32	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Penanaman Modal Tahun 2010 s/d 2015	60
Tabel.T-II.33	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Kebudayaan Tahun 2010 s/d 2015	61
Tabel.T-II.34	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2010 s/d 2015	53
Tabel.T-II.35	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2010 s/d 2015	64
Tabel.T-II.36	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010 s/d 2015	64
Tabel.T-II.37	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010 s/d 2015	66
Tabel.T-II.38	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2010 s/d 2015	67
Tabel.T-II.39	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Statistik Tahun 2010 s/d 2015	68
Tabel.T-II.40	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Kearsipan Tahun 2010 s/d 2015	69

Tabel.T-II.41	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 s/d 2015	69
Tabel.T-II.42	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Perpustakaan Tahun 2010 s/d 2015	70
Tabel.T-II.43	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Pertanian Tahun 2010 s/d 2015	71
Tabel.T-II.44	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Kehutanan Tahun 2010 s/d 2015	72
Tabel.T-II.45	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010 s/d 2015	73
Tabel.T-II.46	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Pariwisata Tahun 2010 s/d 2015	73
Tabel.T-II.47	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 s/d 2015	74
Tabel.T-II.48	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Perdagangan Tahun 2010 s/d 2015	75
Tabel.T-II.49	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Perindustrian Tahun 2010 s/d 2015	75
Tabel.T-II.50	Indikator Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan Ketransmigrasian Tahun 2010 s/d 2015	76
Tabel.T-II.51	Indikator Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2010 s/d 2015	76
Tabel.T-II.52	Indikator Fokus Wilayah dan Infrastruktur Bidang Perhubungan Tahun 2010 s/d 2015	77
Tabel.T-II.53	Indikator Fokus Wilayah dan Infrastruktur Bidang Penataan Ruang Tahun 2010 s/d 2015	78
Tabel.T-II.54	Indikator Fokus Wilayah dan Infrastruktur Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010 s/d 2015	78
Tabel.T-II.55	Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun 2010 s/d 2015	79
Tabel.T-II.56	Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2010 s/d 2015	80
Tabel.T-II.57	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pacitan	81
Tabel.T-III.1	Kontribusi PDRB Sektoral	250
Tabel.T-III.2	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2017	252
Tabel.T-III.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2014 s/d 2017	253
Tabel.T-III.4	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 s/d 2017	255
Tabel.T-III.5	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s/d 2017	257
Tabel.T-IV.1	Hubungan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan	262
Tabel.T-IV.2	Prioritas Pembangunan Daerah	266
Tabel.T-IV.3	Penjelasan Program Pembangunan Daerah	269
Tabel.T-V.1	Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017	279

Daftar Grafik

Grafik.G-II.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 – 2014	25
Grafik.G-II.2	Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%)	26
Grafik.G-II.3	Pendapatan Per Kapita (Rupiah)	27
Grafik.G-II.4	Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2014	28
Grafik.G-II.5	Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011 s/d 2014	28
Grafik.G-II.6	Angka Kriminalitas	29
Grafik.G-II.7	Angka Melek Huruf Kabupaten Pacitan Tahun 2010 – 2015	29
Grafik.G-II.8	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2010-2015	30
Grafik.G-II.9	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2010-2015	31
Grafik.G-II.10	Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2010-2015	32

Daftar Gambar

Gambar.G-II.1	Peta Administratif Kabupaten Pacitan	7
---------------	--	---

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan politik sampai pada perkembangan terakhir adanya penyelarasan dengan konservasi lingkungan. Nilai yang dipegang dalam pembangunan adalah optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumber daya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar memiliki nilai kebermanfaatannya lebih baik bagi masyarakat. Kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik diartikan dalam lingkup luas tidak hanya berarti mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi atas potensi tersebut diharapkan agar mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan. Dengan demikian merupakan inti dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan provinsi maupun pusat. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) atau dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun yang lalu, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD dengan mempertimbangkan sinergi antar sektor dan wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 - 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen pembangunan daerah tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi maupun sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) dimana RKPD menjadi pedoman awal penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD sampai dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD.

RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 merupakan pijakan awal dari penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2016-2021 dengan mengacu RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025. RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Tahun 2017 dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan baik nasional, provinsi maupun kabupaten

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Memberikan gambaran penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalam dokumen RKPD

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi Kabupaten Pacitan

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Menjelaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sampai dengan Tahun 2015

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas pokok fungsi SKPD Kabupaten Pacitan

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan uraian mengenai arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah sebagai acuan didalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Kabupaten Pacitan berkaitan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi misi dan tujuan maupun sasaran pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun 2017 yang merupakan gambaran prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Menjelaskan rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Pacitan Tahun 2017 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Pacitan

BAB VI Penutup

Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan kebijakan publik dan APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2017

1.5 Maksud Dan Tujuan

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Pacitan sekaligus sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat.

Adapun tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan **1) secara substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun; **2) secara normatif**, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD); **3) secara operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja SKPD); dan **4) secara faktual**, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 2

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang memiliki posisi di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tepatnya terletak di Barat Daya dengan luas wilayah 1.389,8716 Km² atau 138.987,16 Ha. Kabupaten Pacitan berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah dengan batas wilayah sebagai berikut :

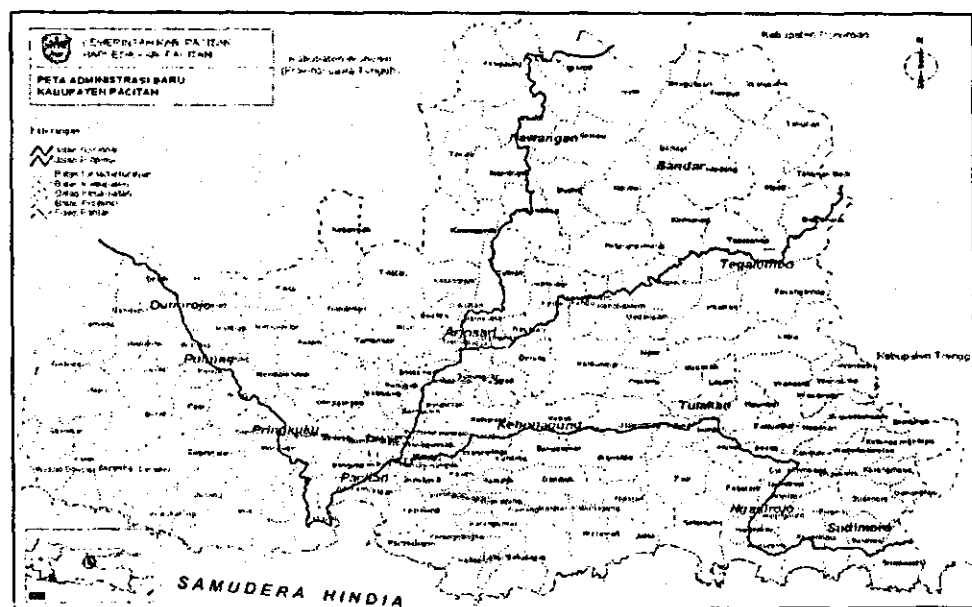
Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Gambar.G-II.1
Peta Administratif Kabupaten Pacitan



Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 Kecamatan, 5 Kelurahan, 166 Desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 Km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 Km². Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, dengan luas 71,86 Km². Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Pacitan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel.T-II.1
Tabel Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Kecamatan
1.	Donorojo	12	109,09
2.	Punung	13	108,81
3.	Pringkuku	13	132,93
4.	Pacitan	25	77,11
5.	Kebonagung	19	124,85
6.	Arjosari	17	117,06
7.	Nawangan	9	124,06
8.	Bandar	8	117,34
9.	Tegalombo	11	149,26
10.	Tulakan	16	161,62
11.	Ngadirojo	18	95,91
12.	Sudimoro	10	71,86

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Secara astronomis Kabupaten Pacitan terletak di antara $07^{\circ} 55'$ - $08^{\circ} 17'$ Lintang Selatan 110° dan $55'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur. Kabupaten Pacitan terletak di sebelah selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan ada tujuh wilayah kecamatan yang memiliki pesisir sepanjang kurang lebih 70,1 km. Adapun dari sisi ketinggian wilayah, Kabupaten Pacitan masuk dataran rendah sampai pengunungan dengan Ketinggiannya mencapai 1231 meter dari permukaan laut yang sebagian besar berupa bukit, gunung, dan jurang tejal.

Pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Pacitan sebagian besar untuk pertanian, luasnya mencapai kurang lebih 9,38% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, perekonomian dan fasilitas umum. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Pacitan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028.

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
2. Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
3. Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
4. Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan
5. Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Januari dan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 581 mm³, suhu udara berkisar antara 22,6°C sampai dengan 32,1°C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%. Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Tanah ladang : 20,42 % atau 28.386,37 ha
2. Pemukiman Penduduk : 11,70 % atau 16.254,76 ha
3. Hutan : 2,99 % atau 4.153,21 ha
4. Sawah : 21,62 % atau 30.045,55 ha
5. Pesisir dan tanah kosong : 43,28.% atau 60.146,27 ha

Sementara itu rencana pola ruang bagi Kabupaten Pacitan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan klasifikasi peruntukan lahan sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung terbagi atas beberapa kawasan berikut :
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terdiri atas :
 - 1) Kawasan Hutan Lindung;
 - 2) Kawasan Karst.
 - b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas :
 - 1) Kawasan sempadan pantai;
 - 2) Kawasan sempadan sungai;
 - 3) Kawasan sekitar mata air;
 - 4) Kawasan sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya
 - 1) Kawasan Cagar Alam;
 - 2) Kawasan Cagar Budaya.
 - d. Kawasan Rawan Bencana Alam
 - 1) Kawasan rawan gempa bumi;
 - 2) Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah;
 - 3) Kawasan gelombang pasang tsunami;
 - 4) Kawasan rawan banjir.
 - e. Kawasan lindung lainnya, terdiri atas :
 - 1) Kawasan ruang terbuka hijau;
 - 2) Kawasan terumbu karang.
2. Kawasan Budidaya, terdiri atas :
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - c. Kawasan peruntukan pertanian;
 - d. Kawasan peruntukan perikanan;
 - e. Kawasan peruntukan perikanan;

- f. Kawasan Peruntukan pertambangan;
- g. Kawasan peruntukan industri;
- h. Kawasan peruntukan pariwisata;
- i. Kawasan peruntukan permukiman;
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Pacitan maka wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Kawasan peruntukan hutan produksi merupakan kawasan hutan di luar kawasan hutan lindung. Jenis kayu hutan di Kabupaten Pacitan terdiri dari kayu jati, mahoni, pinus, akasia, sanakeling, dan lain-lain. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan, arahan lokasi yang digunakan untuk kawasan peruntukan hutan produksi hingga tahun 2028 adalah hutan produksi yang telah berkembang saat ini, yaitu seluas 1.484,39 ha (1,07% dari luas total wilayah Kabupaten Pacitan), seperti pada tabel Luas Kawasan Hutan Produksi.

Perkembangan hutan produksi dapat dilakukan di tanah yang rusak/tandus. Pada kawasan tersebut diperbolehkan adanya kegiatan dan bangunan secara terbatas dengan tetap memperhatikan fungsi perlindungan dibawahnya. Kemudian hutan produksi terbatas juga dikembangkan di kawasan karst.

Tabel.T-II.2
Luas Kawasan Hutan Menurut Jenisnya

No	Kecamatan	Areal Jenis Hutan (Ha)		
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Jumlah
1.	Donorojo	82,30	-	82,30
2.	Punung	90,00	9,30	99,30
3.	Pringkuku	635,10	96,80	749,90
4.	Pacitan	103,80	136,70	240,50
5.	Kebonagung	24,10	-	24,10
6.	Arjosari	82,50	-	82,50
7.	Nawangan	183,20	-	183,20
8.	Bandar	409,40	-	409,40
9.	Tegalombo	70,70	-	70,70
10.	Tulakan	-	-	-
11.	Ngadirojo	-	-	-
12.	Sudimoro	64,60	-	64,60
Jumlah		1.736,70	242,80	2.006,50

Sumber: PT. Perhutani

2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Sebagian besar hutan yang ada di Kabupaten Pacitan merupakan hutan rakyat, namun demikian kawasan peruntukan hutan rakyat tersebut berada pada kelerengan >40% yang pada umumnya dimanfaatkan untuk permukiman, pertanian, kebun/area hutan rakyat, maupun kegiatan budidaya yang lain. Kawasan dengan kemiringan > 40% yang merupakan hutan rakyat yaitu seluas 65.951 Ha (47,45% dari luas total Kabupaten Pacitan). Oleh karena itu, kawasan dengan kemiringan lereng >40% ini memerlukan penanganan tersendiri (tidak mutlak menjadi hutan lindung, karena lahannya dimiliki masyarakat). Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan lokasi yang menyebar pada seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Pacitan dengan luas 13.033 ha (9,38%) dari luas wilayah Kabupaten Pacitan, meliputi pertanian dengan pengairan menggunakan irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, dan tadah hujan (Tabel 2.3.). Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi teknis berlokasi di Kecamatan Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, dan Ngadirojo. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi setengah teknis berlokasi di Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan pertanian yang menggunakan irigasi sederhana berlokasi di Kecamatan Punung, Pringkuku, Pacitan, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan peruntukan pertanian yang menggunakan irigasi desa/non PU berlokasi di Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Kawasan yang menggunakan sawah tadah hujan berlokasi di Kecamatan Donorojo, Punung, Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo, Nawangan, Bandar, Tulakan, Ngadirojo, dan Sudimoro. Sesuai dengan Undang-Undang 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, ditetapkan mengenai lahan pertanian berkelanjutan dengan kriteria:

- a. Lahan beririgasi;
- b. Lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak), dan/atau;
- c. Lahan tidak beririgasi.

Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan pada:

- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Tabel.T-II.3
Luas Kawasan Pertanian

No	Kecamatan	Luas Lahan Pertanian					
		Irigasi Teknis	Irigasi Setengah teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa/non PU	Tadah Hujan	Lain-nya
1	Donorojo	-	8	-	-	83	54
2	Punung	105	55	32	-	562	-
3	Pringkuku	-	57	95	11	319	-
4	Pacitan	94	243	190	15	664	-
5	Kebonagung	155	251	-	787	575	-
6	Arjosari	246	303	86	-	240	-
7	Tegalombo	137	187	165	-	728	-
8	Nawangan	223	294	315	-	848	251
9	Bandar	-	460	642	34	277	264
10	Tulakan	157	102	325	15	828	353
11	Ngadirojo	291	165	175	30	75	-
12	Sudimoro	-	97	140	15	210	-
TOTAL		1.408	2.222	2.165	907	5.409	922

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan

Kawasan peruntukan pertanian tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu budidaya tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan, dan bio farmaka; budidaya peruntukan peternakan; dan peruntukan perkebunan.

1) Kawasan Tanaman Pangan dan Holtikultura, Buah-buahan, dan Bio Farmaka

Kawasan budidaya tanaman pangan dan hortikultura dikelompokkan menjadi: kelompok palawija, kelompok hortikultura/sayuran, kelompok pertanian padi sawah, kelompok buah-buahan, dan kelompok bio farmaka. Kawasan pengembangan palawija berada di lahan dataran rendah dengan kemiringan <15%. Sedangkan kawasan pengembangan tanaman sayuran berada di lahan dataran tinggi dengan kemiringan <15% dan berhawa sejuk. Kawasan budidaya pertanian padi sawah berada di dataran datar sampai berombak, yang memiliki sumber air mencukupi. Kelompok buah-buahan dan bio farmaka dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan.

Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan Tanaman pangan dan Holtikultura, Buah-buahan, dan Bio Farmaka adalah:

- a) Kecamatan Bandar, Nawangan, Tegalombo diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo; manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak, sukun; jahe gajah (bio farmaka).
- b) Kecamatan Ngadirojo, Sudimoro diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo, durian, dukuh, pepaya, jeruk jambu biji, rambutan, sawo, nanas, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak & sukun;
- c) Kecamatan Pacitan diunggulkan untuk pengembangan tanaman melinjo.
- d) Kecamatan Punung, Donorojo, Pringkuku diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing, mangga, pisang, salak & sukun.
- e) Kecamatan Kebonagung, Arjosari, Tulakan diunggulkan untuk pengembangan tanaman pepaya, sawo, nanas, jeruk, durian, jambu biji, rambutan, melinjo, manggis, nangka, alpukat, sirsak, belimbing.

2) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan menyebar pada seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan. Kawasan peruntukan peternakan dikelompokkan menjadi dua kawasan pengembangan, yaitu kawasan pengembangan ternak kerbau dan kawasan pengembangan ternak sapi, kambing, dan domba.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan ternak kerbau adalah di lahan dataran rendah, topografi datar 0-8%, dekat sumber air dan banyak sumber hijauan pakan ternak. Daerah yang memenuhi kriteria tersebut adalah beberapa desa di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Punung dan Kecamatan Pringkuku.

Arahan pemilihan lokasi pengembangan kawasan peternakan sapi, kambing, dan domba adalah di lahan kering, hawanya tidak terlalu panas, banyak sumber hijauan pakan ternak dan bukan daerah endemis antrax.

Daerah yang memenuhi kriteria tersebut adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan, kecuali Kelurahan Sidoharjo, Kelurahan Ploso dan Desa Kembang Kecamatan Pacitan, serta Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung.

3) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan menyebar pada seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kawasan ini menempati lereng bergelombang hingga agak berbukit. Lokasi pengembangan kawasan perkebunan adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pacitan. Komoditi perkebunan yang ada dan sangat prospektif untuk dikembangkan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

- a) Tanaman semusim: kapas,
- b) Tanaman tahunan: kelapa, panili, cengkeh, kopi, kakao.

Lokasi pengembangan kawasan perkebunan:

- a) Kapas: Donorojo, Punung
- b) Kelapa, getah pinus: Bandar, Ngadirojo
- c) Kelapa: Pacitan, Punung, Donorojo, Pringkuku, Kebonagung, Sudimoro, Arjosari
- d) Cengkeh: Kebonagung, Tegalombo, Nawangan, Tulakan, Bandar, Ngadirojo, Sudimoro
- e) Kopi: Kebonagung, Nawangan, Bandar, Ngadirojo
- f) Kakao: Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo

4. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat budidaya tambak, kolam, karamba, dan jala apung. Arahkan Pemilihan lokasi Kawasan Budidaya Perikanan Air Payau terletak di pesisir pantai dan bukan ekosistem hutan bakau. Sedangkan lokasi kawasan Budidaya Air Tawar terletak pada daerah yang mempunyai potensi air yang cukup untuk usaha budidaya, topografi datar, tekstur tanah halus, kualitas air baik.

Kawasan peruntukan perikanan berlokasi di sebagian wilayah Kecamatan Pacitan, Kebonagung, Tulakan, Ngadirojo, Sudimoro, Punung, Donorojo, Arjosari, Pringkuku, Tegalombo dan Bandar.

Pengembangan budidaya perikanan tambak juga dikembangkan disepanjang pantai Kabupaten Pacitan yang termasuk kedalam kawasan sempadan pantai yang termasuk kedalam daerah rawan tsunami. Sedangkan untuk wilayah tangkapan ikan laut terbagi atas dua kelompok wilayah, yaitu tangkapan ikan di wilayah perairan laut dangkal dan wilayah perairan laut dalam dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pacitan 4 mil laut.

5. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi bahan tambang dan galian di Kabupaten Pacitan mencapai 85% dari luas Kabupaten Pacitan. Namun dengan tingginya persentase luasan kawasan lindung di Pacitan, menyebabkan terbatasnya lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan tambang. Kawasan peruntukan

pertambangan meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

Pertambangan mineral meliputi:

- 1) Pertambangan mineral radioaktif, meliputi
 - a) Uranium di Kecamatan Tulakan.
- 2) Pertambangan mineral logam, meliputi:
 - a) Timah putih di Kecamatan Ngadirojo.
 - b) Nikel di Kecamatan Ngadirojo.
 - c) Timah hitam di Kecamatan Ngadirojo, Tulakan, Nawangan.
 - d) Tembaga di Kecamatan Pacitan, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo.
 - e) Seng di Kecamatan Ngadirojo, Tulakan, Tegalombo.
 - l) Emas di Kecamatan Ngadirojo, Tegalombo, Punung, Arjosari, Pringkuku, Nawangan, Tulakan, Bandar.
 - g) Pasir besi di Kecamatan Ngadirojo, Donorojo.
 - h) Batu besi di Kecamatan Kebonagung, Pacitan, Tegalombo.
- 3) Pertambangan mineral bukan logam, meliputi:
 - a) Mangan di Kecamatan Tegalombo, Nawangan, Bandar.
 - b) Batu gamping di Kecamatan Tulakan, Ngadirojo, Pacitan, Kebonagung, Sudimoro.
 - c) Dolomit di Kecamatan Kebonagung, Tulakan.
 - d) Gypsum di Kecamatan Tegalombo, Nawangan.
 - e) Bentonit di Kecamatan Donorojo, Punung, Tulakan, Pringkuku, Tegalombo.
 - f) Kalsit di Kecamatan Pringkuku, Punung, Donorojo.
 - g) Zeolit di Kecamatan Bandar.
 - h) Oker di Kecamatan Bandar, Tegalombo, Tulakan.
 - i) Fosfat di Kecamatan Donorojo, Pringkuku, Ngadirojo.
 - j) Pirophyllit di Kecamatan Arjosari, Nawangan.
 - k) Kaolin di Kecamatan Bandar, Punung, Tegalombo, Pringkuku, Arjosari.
 - l) Feldspar di Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Tulakan, Punung, Arjosari.
 - m) Pasir kuarsa di Kecamatan Tegalombo, Ngadirojo, Donorojo, Pacitan.
 - n) Toseki di Kecamatan Arjosari, Nawangan.
 - o) Ball clay di Kecamatan Punung, Kebonagung, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo.
 - p) Fosil kayu di sepanjang sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
 - q) Rijang di Kecamatan Punung, Ngadirojo.
 - r) Kalsedon/agate di sepanjang sungai di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.

- s) Jasper di Kecamatan Donorojo, Tegalombo, Pacitan.
 - t) Kristal kuarsa di Kecamatan Nawangan.
 - u) Agat di Kecamatan Tegalombo.
- 4) Kawasan potensial pertambangan mineral batuan, meliputi:
- a) Batu pasir di Kecamatan Arjosari.
 - b) Lempung (tanah liat) di Kecamatan Tegalombo, Tulakan, Pacitan, Kebonagung.
 - c) Batuan beku di Kecamatan Nawangan, Ngadirojo, Pacitan, Tulakan, Bandar.
 - d) Sirtu di sepanjang Sungai Grindulu, Brongkah, Pacitan, Watugaleng, Tumpuk, Guyangan, Lorok, Ngroto, Bawur.
 - e) Marmer di Kecamatan Tulakan Kebonagung, Sudimoro.
 - f) Trass di Kecamatan Kebonagung, Tulakan.
- 5) Pertambangan batu bara meliputi:
- a) Batubara di Kecamatan Tulakan (Desa Jatigunung, Desa Gasang, dan Desa Kalikuning), Kebonagung (Desa Ketepung), Punung (Desa Mendolo Kidul).

6. Kawasan Peruntukan Industri

Industri yang prospektif dikembangkan di Kabupaten Pacitan adalah industri yang mendukung kegiatan pertanian (terutama di kawasan agropolitan), pariwisata, perikanan, pertambangan dan industri rumah tangga. Lokasi yang diperbolehkan untuk dibangun sebagai kawasan peruntukan industri adalah daerah yang memiliki kemiringan lereng sekitar 0-8% dari kecamatan-kecamatan berikut ini:

- 1) Kecamatan Ngadirojo dan Sudimoro, dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang dan batik tulis.
- 2) Kecamatan Donorojo dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, produksi Batu Aji/Batu Mulia, dan industri gula merah, pengolahan hasil tambang.
- 3) Kecamatan Punung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang produksi mainan anak yang terbuat dari kayu jati, pengolahan hasil tambang.
- 4) Kecamatan Kebonagung dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, produksi keramik/gerabah seni dan industri gula merah
- 5) Kecamatan Pacitan dan Ngadirojo dengan industri yang prospektif dikembangkan adalah industri produksi sale pisang, Batik Tulis, industri pengolahan ikan.

6) Kecamatan Nawangan dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri pendukung hasil pertanian dan produksi sale pisang serta produksi anyaman bambu.

7) Kecamatan Arjosari dengan salah satu industri yang prospektif dikembangkan adalah industri pendukung hasil pertanian, pengolahan hasil tambang.

7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan ini merupakan kawasan yang berpotensi wisata seperti obyek wisata pantai, goa, sejarah dan arkeologis, budaya dan obyek wisata pemandian.

Rencana perwilayahan kawasan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan adalah:

1) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) A

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Punung, dengan cakupan wilayah Kecamatan Donorojo, Punung (bagian barat), Pringkuku (bagian barat). Dengan tema pengembangan wisata: "Kelautan dan Ekowisata Alam/Ekowisata Karst"

2) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) B

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Pacitan, dengan cakupan wilayah Kecamatan Pacitan, Punung (bagian timur), Pringkuku (bagian timur), Arjosari (bagian barat), Kebonagung (sebagian kecil wilayah barat).

Dengan tema pengembangan wisata "Kelautan, Budaya, dan Wisata Kota"

3) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) C

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Ngadirojo, dengan cakupan wilayah Kecamatan Kebonagung, Sudimoro, Tegalombo (bagian selatan), Arjosari (bagian selatan dan timur), Tulakan, Ngadirojo, serta Pacitan (sebagian kecil wilayah timur). Dengan tema pengembangan wisata "Kelautan, Alam, dan Wisata Budaya".

4) Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) D

Pusat pelayanan terletak di Kecamatan Nawangan, dengan cakupan wilayah Kecamatan Nawangan, Tegalombo (bagian utara), Bandar, dan Arjosari (bagian utara). Dengan tema pengembangan wisata "Benda-Benda Buatan Manusia, Wisata Sejarah, dan Agrowisata".

8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Rencana kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Pacitan saat ini berkembang mengikuti struktur jalan di Kabupaten Pacitan, dan diprediksikan akan tetap seperti itu. Kawasan permukiman adalah suatu kawasan yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan kegiatan masyarakatnya. Arahkan Pemilihan lokasi Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Pacitan adalah memiliki bentuk

wilayah relatif datar (lereng < 15%), tidak ada bahaya banjir, ada sumber air bersih dan terdapat sarana dan prasarana jalan.

Kecamatan yang diarahkan akan dikembangkan sebagai daerah permukiman hingga tahun 2028 adalah Kecamatan Pacitan, Kecamatan Sudimoro (dengan adanya kegiatan PLTU), serta lokasi sepanjang jalan Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Punung dan Kecamatan Ngadirojo. Namun demikian tidak menutup kemungkinan pengembangan permukiman di sekitar permukiman yang telah ada.

Permukiman dibagi menjadi dua kelompok, yaitu permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan. Permukiman perkotaan merupakan permukiman yang sebagian besar kegiatannya bukan pertanian dan ini terletak di Kecamatan Pacitan.

Permukiman lainnya selain Kecamatan Pacitan, saat ini merupakan permukiman pedesaan. Namun hingga tahun 2028 diperkirakan ada beberapa kecamatan yang permukimannya akan bergeser menjadi permukiman perkotaan, diantaranya adalah permukiman disepanjang jalur kolektor primer. Selain itu juga diperkirakan adanya desa-desa yang akan tumbuh pesat akibat adanya pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) yaitu desa-desa yang dilalui oleh JLS.

Permukiman pedesaan sebagian besar tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pacitan dengan pengelompokan skala kecil. Permukiman pedesaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Pacitan lokasinya menyebar yang disebabkan terbatasnya lahan di Kabupaten Pacitan yang dapat atau layak digunakan sebagai permukiman. Penyebaran lokasi permukiman pedesaan, juga menyebabkan permukiman pedesaan tidak dapat dilayani prasarana permukiman secara merata.

Pemenuhan pelayanan prasarana bagi permukiman pedesaan dilakukan dengan alternatif penggunaan teknik yang lebih sederhana.

Hal lain yang perlu diperhatikan pada masa mendatang adalah, seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan, maka perlu penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal, terutama di kawasan perkotaan dan ibu kota kecamatan.

9. Kawasan Peruntukan Lainnya

1) Kawasan Andalan

Merujuk pada RTRW Nasional, wilayah Madiun dan sekitarnya (termasuk didalamnya Kabupaten Pacitan) telah ditetapkan sebagai kawasan andalan nasional untuk Pertanian, Industri Pengolahan, Perikanan, Perkebunan, Pariwisata.

Dengan penetapan tersebut, maka berdasarkan potensi yang dimiliki dan peluang pengembangannya, kawasan andalan di Kabupaten Pacitan ditetapkan terdiri dari:

- a) Kawasan andalan pertanian, meliputi kawasan peruntukan pertanian di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dengan konsentrasi pada kawasan strategis ekonomi (kawasan agropolitan) di Kecamatan Nawangan dan Kecamatan Bandar. Kawasan andalan perikanan, meliputi kawasan peruntukan perikanan di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Arjosari, Kecamatan Tegalombo, Kecamatan Bandar, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro dengan konsentrasi pada perikanan laut di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebonagung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirojo, dan Kecamatan Sudimoro.
 - b) Kawasan andalan pariwisata, meliputi kawasan peruntukan pariwisata di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan.
- 2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Pangkalan udara TNI AU Iswahyudi

KKOP (Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan) secara umum meliputi ruang udara di wilayah Kabupaten Pacitan. Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan dijelaskan pada pasal 11, bahwa Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di sekitar bandar udara meliputi:

- a. kawasan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - f. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - g. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
- KKOP yang terkait dengan ruang wilayah Kabupaten Pacitan yang dikemukakan tersebut akan mempengaruhi prinsip penetapan ketinggian bangunan maksimal di Kabupaten Pacitan.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Samudera serta didominasi dengan perbukitan dan pegunungan, menyebabkan Kabupaten Pacitan menjadi salah satu kabupaten yang rawan terkena

bencana alam baik banjir, tanah longsor, gempa bumi dan gelombang tsunami.

Kawasan lindung di Kabupaten Pacitan yang tergolong sebagai kawasan rawan bencana terbagi atas empat jenis kawasan yaitu : kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami, kawasan rawan banjir, dengan sebaran sebagai berikut:

1. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kabupaten Pacitan yang berada di atas lempeng India-Australia kondisinya saat ini sangat rapat karena mendapat tekanan dari lempeng Eropa-Asia. Berdasarkan kondisi tersebut maka seluruh wilayah Kabupaten Pacitan termasuk kedalam kawasan rawan gempa bumi;

2. Kawasan Rawan Tanah Longsor/Gerakan Tanah

Kawasan rawan tanah longsor/gerakan tanah di Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40% dan kawasan yang memiliki jenis tanah Redzina dan Litosol. Pada kawasan yang memiliki kriteria tersebut penggunaan lahan sedapat mungkin berupa hutan lindung/hutan rakyat

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang Tsunami

Adapun kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana tsunami dan perlu diatur penggunaan lahannya adalah seluruh wilayah pantai di bagian selatan Kabupaten Pacitan yang memiliki kemiringan landai dan juga wilayah-wilayah yang dilalui oleh sungai-sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

4. Kawasan Rawan Banjir

Titik-titik rawan banjir di wilayah Kabupaten Pacitan sangat erat kaitannya dengan keberadaan sungai-sungai utama yang ada yaitu Sungai Baksoko, Sungai Lorog, Sungai Pagotan, Sungai Bawur dan terutama Sungai Grindulu. Daerah yang masuk kedalam kawasan rawan banjir adalah sebagian wilayah Kecamatan Arjosari, Pacitan dan Kebonagung.

Selama kurun waktu tahun 2011-2016 bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pacitan telah mengakibatkan berbagai kerusakan baik rumah penduduk maupun fasilitas umum.

2.1.1.4 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 4 Tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel.T-II.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Tahun 2012 - 2015

Usia (Tahun)	2012			2013			2014			2015		
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0-4	19.112	18.083	37.195	10.805	17.829	36.634	18.487	17.568	36.055	18.140	19.292	35.432
5-9	19.455	18.435	37.890	19.365	18.300	37.665	19.214	18.155	37.369	19.041	17.985	37.026
10-14	21.907	20.596	42.503	21.364	20.342	41.976	21.351	20.099	41.450	21.136	19.898	41.034
0-14	60.474	57.114	117.588	51.534	56.471	116.275	59.052	55.822	114.874	58.317	57.175	113.492
%	22,72	20,42	21,54	19,28	20,13	21,22	22,02	19,84	20,91	21,69	20,13	20,79
15-19	20.037	18.170	38.207	20.119	18.096	38.215	20.111	18.003	38.114	20.036	17.887	37.923
20-24	16.998	17.462	34.460	17.028	17.403	34.431	17.051	17.357	34.408	17.066	17.299	34.365
25-29	16.426	17.484	33.910	16.195	17.146	33.341	16.003	16.865	32.868	15.873	16.689	32.562
30-34	15.326	17.172	32.998	15.626	16.992	32.618	15.416	16.777	32.193	15.172	16.488	31.660
35-39	19.208	21.131	40.339	19.060	20.979	40.039	18.837	20.829	39.666	18.646	20.702	39.348
40-44	21.282	22.589	43.711	21.269	22.512	43.781	21.173	22.390	43.563	21.028	22.233	43.261
45-49	20.833	22.120	42.953	21.085	22.363	43.448	21.268	22.547	43.815	21.387	22.664	44.051
50-64	18.524	20.114	38.638	18.080	20.655	39.463	19.058	21.145	40.203	19.329	21.602	40.931
55-59	16.503	16.187	32.690	17.070	16.957	34.027	17.548	17.696	35.244	17.960	18.339	36.299
60-64	12.463	13.374	25.637	13.124	13.771	26.895	13.746	14.291	28.055	14.356	14.954	24.310
15-64	178.100	185.303	363.743	178.656	186.874	366.258	180.211	187.900	368.129	180.853	188.857	364.710
%	66,91	66,43	66,65	66,82	66,62	66,85	67,20	66,80	67,00	67,26	66,48	66,80
65 ke atas	27.621	36.793	64.414	37.160	37.160	65.384	23.902	37.576	66.478	29.726	38.058	67.784
%	10,38	13,15	11,50	15,90	13,25	11,93	10,78	13,36	12,10	11,05	13,40	12,41
Jumlah	266.195	279.710	545.745	267.350	280.505	547.917	268.165	281.293	549.481	268.896	284.090	545.986

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
 (realisasi dan proyeksi jumlah penduduk 2010 - 2020)

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk 2010 - 2020 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk pertengahan tahun 2012 mencapai 545.745 jiwa dan pada tahun 2015 mencapai 545.986 jiwa atau mencatat rata-rata pertumbuhan sekitar 0,015% per tahun. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) jumlahnya cenderung meningkat, dari sekitar 66,10% dari total penduduk pada tahun 2011 menjadi sekitar 70,40% pada tahun 2015. Sedangkan pada penduduk kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), proporsinya cenderung mengalami penurunan dari 22,15% dari total penduduk pada tahun 2011 menjadi sekitar 18,73% pada tahun 2015. Struktur penduduk menurut ketenagakerjaan dapat digolongkan berdasarkan pada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dibedakan sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Mereka yang dapat diserap oleh pasar kerja digolongkan bekerja, sedangkan yang tidak / belum diserap oleh pasar kerja yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan. Di sisi lain, mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi digolongkan sebagai bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga, sekolah atau mereka yang tidak mampu melakukan kegiatan karena usia tua atau alasan kesehatan fisik (cacat).

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.T-II.5
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2014

Lapangan Usaha	2011		2012		2013		2014	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pertanian	184.055	64,73	196.840	58,85	229.008	68,61	228.860	66,28
Pertambangan dan Penggalian	3.126	1,10	9.750	2,91	3.266	0,98	1.561	0,45
Industri	25.689	9,03	25.826	7,72	31.179	9,34	30.112	8,72
Listrik, Gas dan Air bersih	-	0,00	1.586	0,47	1.327	0,40	419	0,12
Konstruksi	11.786	4,14	25.353	7,58	10.809	3,24	16.742	4,85
Perdagangan, Hotel dan Restoran	30.939	10,88	29.205	8,73	27.024	8,10	34.474	9,98
Angkutan dan Telekomunikasi	3.407	1,20	6.079	1,82	3.736	1,12	5.459	1,58
Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.935	1,03	2.811	0,84	1.555	0,47	3.255	0,94
Jasa-jasa	22.407	7,88	37.049	11,08	25.874	7,75	24.388	7,06
Jumlah	284.344	100,00	334.499	100,00	333.778	100,00	345.270	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian adalah yang terbesar, lebih dari separuh penduduk yang bekerja bertumpu pada sektor ini. Jika dibandingkan dengan lapangan usaha atau sektor ekonomi lain (seperti sektor Industri, Perdagangan dan Jasa-jasa), penduduk yang bekerja di sektor pertanian proporsinya cenderung sedikit menurun.

Sementara itu komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui pada tabel berikut :

Tabel.T-II.6
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011 - 2014

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Tidak/ Belum Sekolah, Tidak/ Belum Tamat SD/ MI	120.473	121.136	121.237	115.329
	(%)	25,83	24,14	25,99	24,28
2	Tamat SD/ MI	184.452	202.936	181.521	174.421
	(%)	39,55	40,44	38,92	36,72
3	SLTP (SMP/ MTs)	90.650	100.013	90.791	100.465
	(%)	19,44	19,93	19,46	21,15
4	SLTA (SMU/ SMK/ MA)	53.481	58.703	54.388	64.059
	(%)	11,47	11,7	11,66	13,49
5	D1 ke atas (D1/ D2/ D3/ D4/ PT)	17.272	19.031	18.497	20.678
	(%)	3,71	3,79	3,96	4,35
Jumlah		466.328	501.819	466.434	474.952
(%)		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : LKPJ Kab. Pacitan Tahun 2015

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Pacitan, ditinjau dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada satu waktu tertentu. Penyajian PDRB menurut sektor dirinci menurut total nilai tambah dari 17 sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; pengadaan air, pengelolaan sampah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan,

pertahanan; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya. Nilai PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, mengalami kenaikan di dibandingkan dengan tahun 2013. Data PDRB ADHB dan PDRB ADHK (2010) Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-II.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2013 dan 2014

(Rp.000.000,00)

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2.853.202,20	3.205.937,20
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	543.347,00	619.434,50
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	638.930,10	703.833,80
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	2.912,90	3.001,80
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	8.766,50	9.586,40
F	KONSTRUKSI	1.402.753,40	1.587.605,70
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.518.502,60	1.669.333,70
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	188.539,60	217.275,00
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	174.723,40	200.978,50
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	521.087,70	563.524,00
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	178.491,50	202.167,00
L	REAL ESTATE	146.606,70	160.161,30
M, N	JASA PERUSAHAAN	25.385,30	27.689,10
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	433.223,10	446.622,90
P	JASA PENDIDIKAN	451.339,50	509.039,70
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	83.892,90	95.619,70
R, S, T, U	JASA LAINNYA	243.961,30	276.807,00
JUMLAH/TOTAL		9.415.665,57	10.498.617,48

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

Tabel.T-II.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2013 dan 2014

(Rp.000.000,00)

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2.306.121,00	2.392.241,20
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	497.298,50	516.399,10
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	564.622,20	590.005,40
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3.331,10	3.424,20
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	7.845,00	8.072,40
F	KONSTRUKSI	1.182.250,10	1.239.596,90
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	1.366.145,60	1.456.620,10
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	176.665,90	195.994,10
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	154.615,50	167.569,00
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	505.967,90	544.065,40
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	150.879,20	161.881,30
L	REAL ESTATE	133.875,30	143.474,20

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
M, N	JASA PERUSAHAAN	22.417,00	23.904,60
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	383.013,80	386.725,60
P	JASA PENDIDIKAN	392.604,00	420.610,50
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	76.925,50	83.109,90
R, S, T, U	JASA LAINNYA	228.591,40	243.882,10
JUMLAH/TOTAL		8.153.169,20	8.577.575,99

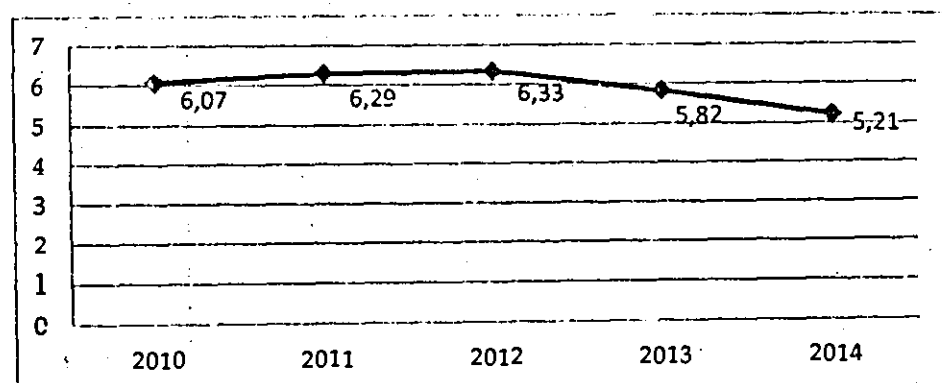
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

PDRB ADHB tahun 2014 sebesar 10.498,62 milyar rupiah meningkat sebesar 11,50% dari tahun 2013, sedangkan PDRB ADHK (2010) tahun 2014 meningkat menjadi 8.577,52 milyar rupiah atau sebesar 5,21% dari tahun 2013. PDRB tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, penyumbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-masing sebesar 3.205,94 milyar rupiah dan 2.392,24 milyar rupiah. Bila dilihat peranan masing-masing sektor terhadap PDRB ADHB, sektor pertanian memberikan distribusi yang terbesar, yaitu sebesar 30,5%. Distribusi terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 0,03%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari indeks berantai atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahun 2014 sebesar 5,21. Nilai ini turun sebesar 0,61 poin dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,82. Bila dilihat menurut per sektor, laju pertumbuhan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,94. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat perbedaan percepatan pertumbuhan, dengan sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2013 merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya yaitu sebesar 12,3. Berikut adalah gambar laju pertumbuhan ekonomi dan tabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan.

Grafik.G-II.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Tabel.T-II.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan 2014

Sektor		Tahun	
		2013*	2014**
(1)		(2)	(3)
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN	2,47	3,73
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	3,87	3,84
C	INDUSTRI PENGOLAHAN	4,86	4,50
D	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3,86	2,79
E	PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH	7,83	2,90
F	KONSTRUKSI	7,07	4,85
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	8,57	6,62
H	TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN	9,96	10,94
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM	8,61	8,38
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9,64	7,53
K	JASA KEUANGAN DAN ASURANSI	12,30	7,29
L	REAL ESTATE	7,58	7,17
M, N	JASA PERUSAHAAN	6,36	6,64
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN	2,04	0,97
P	JASA PENDIDIKAN	9,36	7,13
Q	JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL	9,61	8,04
R, S, T, U	JASA LAINNYA	6,19	6,69
JUMLAH/TOTAL		5,82	5,21

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

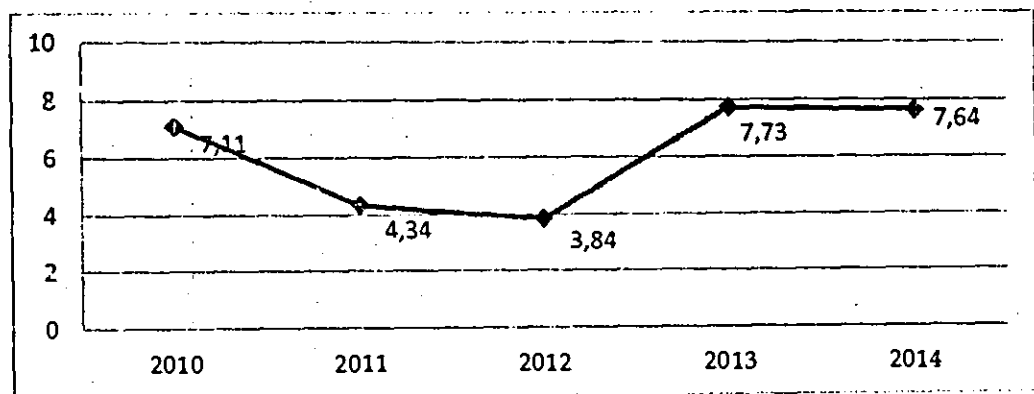
* Angka Diperbaiki

** Angka Sementara

2) Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%)

Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan tahun 2010 sebesar 7,11%, angka ini bergerak naik turun selama 5 tahun terakhir dan tahun 2014 sebesar 7,64%. Berikut adalah grafik laju inflasi Kabupaten Pacitan.

Grafik.G-II.2
Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%)



Sumber: EPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

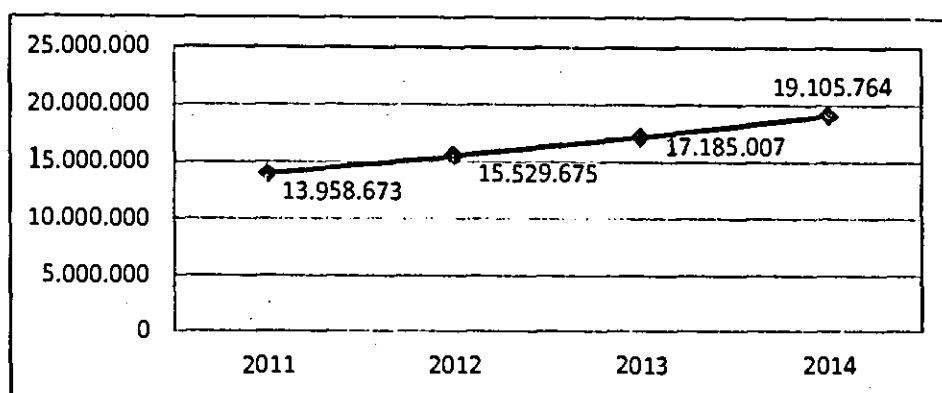
3) Pendapatan Per Kapita (Rupiah)

Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk. Pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran tingkat

kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu atau perbandingannya dengan daerah lain.

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2011 mencapai Rp.13.958.673,00 dan meningkat menjadi Rp.19.105.764,00 pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata 36,87% per tahun. Berikut adalah grafik Pendapatan Per Kapita dalam Rupiah Kabupaten Pacitan:

Grafik.G-11.3
Pendapatan Per Kapita (Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

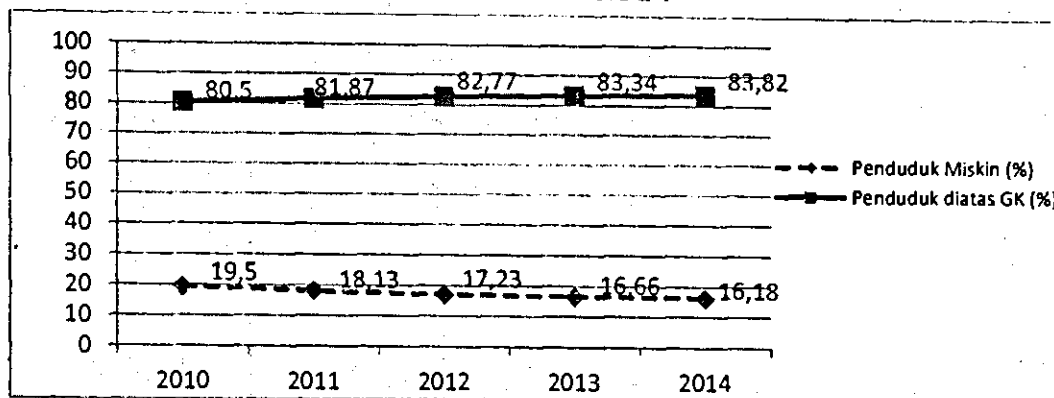
4) Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang dihitung dengan menggunakan formula $(100 - \text{angka kemiskinan})\%$. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index (HCI)*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Data persentase penduduk miskin dan penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Pacitan disajikan pada grafik berikut :

Grafik.G-II.4
Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Tahun 2010-2014



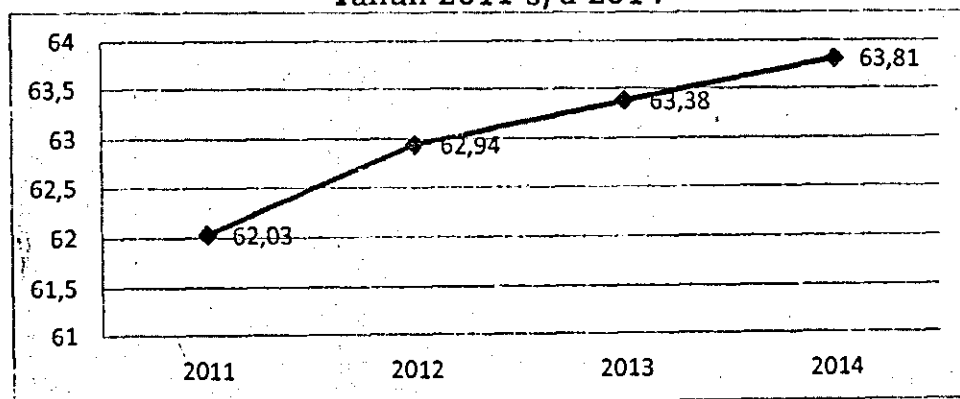
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Dari Grafik 2.4 di atas tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2010 sebesar 19,50 %, tahun 2011 sebesar 18,13 %, tahun 2012 sebesar 17,23 %, tahun 2013 sebesar 16,66 %, dan pada tahun 2014 sebesar 16,18%, atau selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3,32 %. Angka tersebut masih jauh di atas tingkat kemiskinan nasional (10,96 %) maupun Provinsi Jawa Timur (12,28 %). Artinya penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2014 sebesar 83,82%.

5) Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2011 yaitu sebesar 62,03, tahun 2012 menjadi sebesar 62,94, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 63,38, dan tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 63,81. Perhitungan ini didasarkan pada formula perhitungan IPM yang baru. Berikut kami sajikan data IPM Kabupaten Pacitan tahun 2011 s/d 2014 :

Grafik.G-II.5
Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 s/d 2014

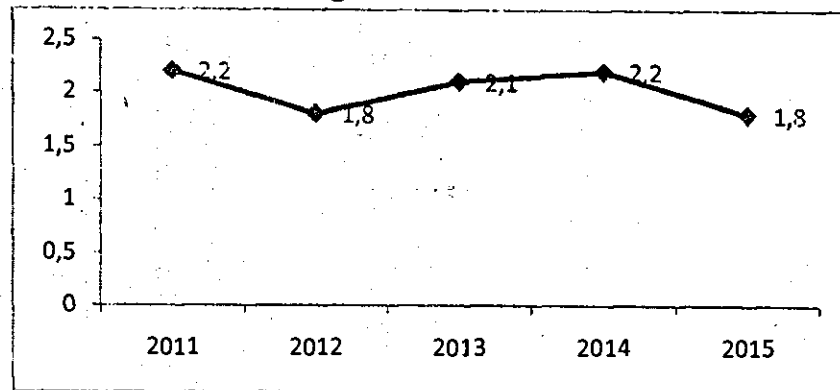


Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

6) Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 terealisasi 1,8 mengalami penurunan 0,4 dibanding capaian tahun 2014. Kasus tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 143 kasus dan di tahun 2015 sebanyak 123 kasus. Berikut adalah grafik angka kriminalitas di Kabupaten Pacitan.

Grafik.G-II.6
Angka Kriminalitas



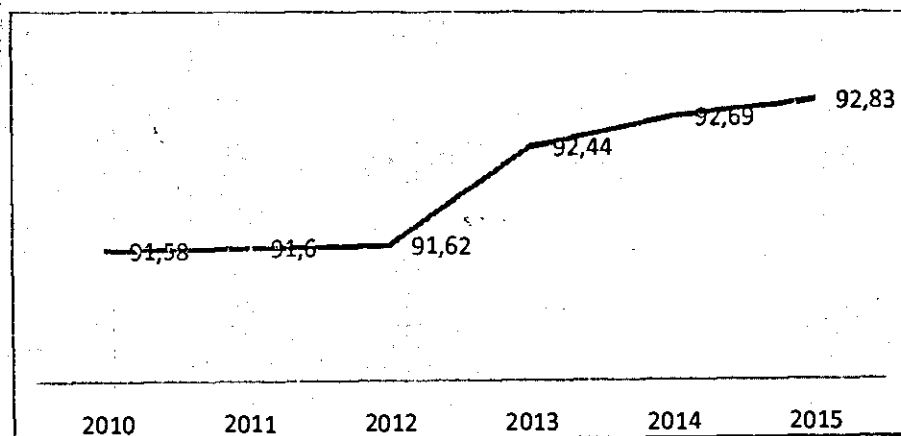
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf Kabupaten Pacitan pada tahun 2010 adalah 91,58 dan pada tahun 2011 adalah 91,60. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur maka pada tahun 2010 sampai dengan 2015 angka melek huruf Kabupaten Pacitan lebih rendah dari angka melek huruf di Jawa Timur. Berikut perkembangan angka melek huruf Kabupaten Pacitan sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik.G-II.7.
Angka Melek Huruf Kabupaten Pacitan
Tahun 2010 - 2015

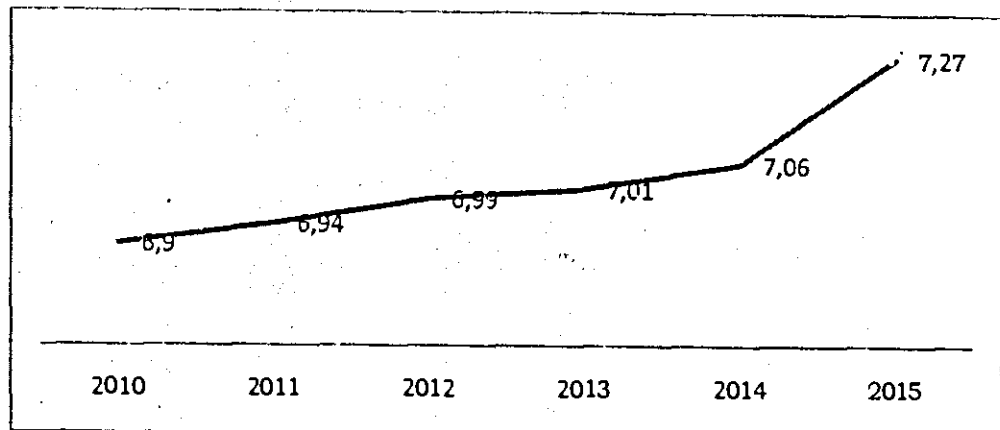


Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan mulai tahun 2010-2015 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Gafik.G-II.8
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Pacitan Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

Dari Grafik dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2010 adalah 6,9 tahun dan pada tahun 2015 adalah 7,27 tahun. Apabila dibandingkan dengan Jawa Timur maka pada tahun 2010 sampai dengan 2015 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan lebih rendah dari angka provinsi Jawa Timur, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih keras untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pacitan.

3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Capaian APK semua jenjang pendidikan di Kabupaten Pacitan sudah baik dan perlu ditingkatkan hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel.T-II.10
Angka Partisipasi Kasar (APK)

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/ MI /Paket A	103,1	103,1	103,11	103,1	103,11	103,12
2.	SMP/ MTs/ Paket B	96,5	97,25	97,34	97,45	97,91	98,62
3.	SMA/ SMK/ MA/ Paket C	67,15	68,05	68,35	69,09	70,15	71,54

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

4) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada

kelompok usia tersebut. Capaian APM yang masih perlu ditingkatkan adalah pada jenjang SMP/MTs, dengan capaian baru mencapai 85,14% pada tahun 2015 dan APM SMA/SMK/SMALB/MA sebesar 60,44%.

Tabel.T-II.11
Angka Partisipasi Murni (APM)

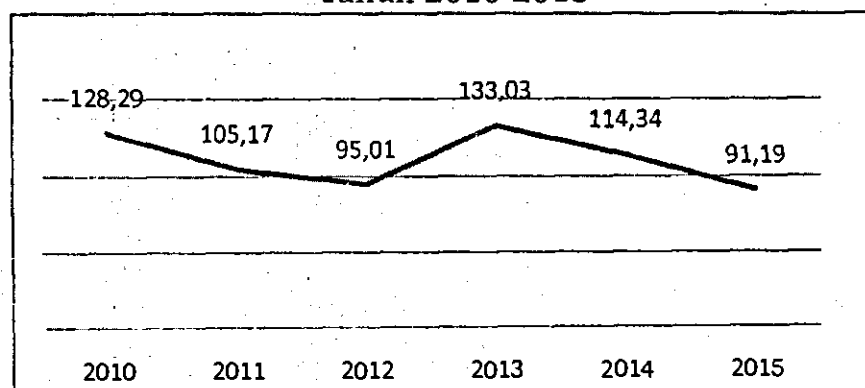
No.	Tingkat Pendidikan	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	SD/ MI	98,17	98,21	98,91	98,91	98,99	99,03
2.	SMP/ MTs	81,58	82,49	82,72	82,81	84,23	85,14
3.	SMA/ SMK/ MA/ Paket C	53,05	54,5	55,38	55,56	59,86	60,44

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Pacitan

5) Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pacitan dari tahun 2010–2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010 AKI sebesar 128,29 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami penurunan tajam pada tahun 2011 menjadi 105,17 per 100.000 kelahiran hidup akan tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 133,03 dan pada tahun 2014 turun lagi menjadi 114,34 dan tahun 2015 menjadi 91,19 per 100.000 Kelahiran hidup.

Grafik.G-II.9
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pacitan

6) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai

probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pacitan dari tahun 2010-2014 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2010 AKB Kabupaten Pacitan sebesar 12,38 per 1.000 kelahiran hidup turun pada tahun 2014 menjadi 9,64 dan sedikit meningkat menjadi 9,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

Angka Kematian Balita (AKBa) dihitung berdasarkan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Balita (AKBa) dihitung berdasarkan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKBa di Kabupaten Pacitan dari tahun 2010-2015 juga fluktuatif pada tahun 2010 sebesar 0,64 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 0,26 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2011. AKABA tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 1,2 per 1.000 kelahiran hidup. Pada akhir tahun 2015 AKABA mengalami penurunan menjadi 0,7 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel.T-II.12
Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1000 Kelahiran Hidup
Tahun 2010-2015

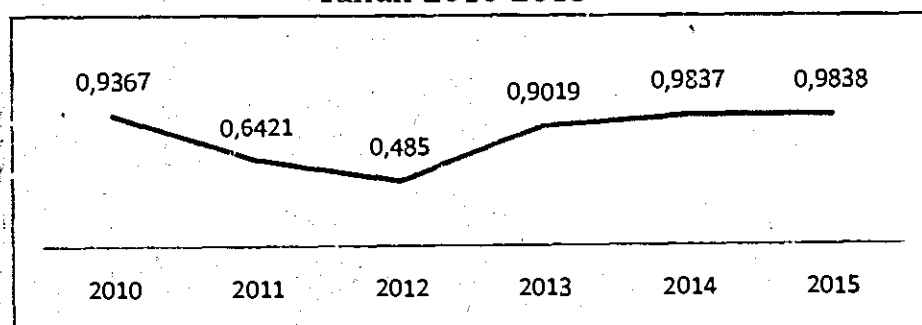
No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	12,38	11,57	11,4	9,98	9,64	9,73
2.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	0,64	0,26	0,68	1,2	0,82	0,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pacitan

7) Rasio penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang berkerja adalah perbandingan penduduk usia di atas 15 tahun yang bekerja dengan total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun ke atas. Rasio penduduk yang bekerja selalu meningkat sejak tahun 2010 hingga dengan 2015. Berdasarkan data yang ada, rasio penduduk bekerja pada tahun 2015 mencapai 0,9838. Hal tersebut berarti di setiap 100 penduduk angkatan kerja terdapat 98 orang yang bekerja.

Grafik.G-II.10
Rasio Penduduk yang Bekerja
Tahun 2010-2015



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan

8) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat partisipasi tenaga kerja (*labor force participation rate*) adalah rasio antara angkatan kerja (semua yang saat ini bekerja atau mencari kerja) dengan total penduduk usia kerja. Dalam kurun waktu lima tahun (2010-2015), dua variabel utama bidang ketenagakerjaan menunjukkan kinerja yang membaik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan trend yang meningkat, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Pacitan pada tahun 2013 sebesar 68,85%, mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 79,71%. Sementara itu tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,54%, dari tahun 2010, dan menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 1,08%.

Tabel.T-II.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Angka Pengangguran Terbuka Tahun 2010-2015

No	Uraian	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	83	70,81	79,71	68,85	98,37	101,6
2.	Angka pengangguran terbuka	0,87	1,54	1,02	0,99	1,08	-

Sumber : BPS Kab. Pacitan

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga

Untuk menjaga kekayaan seni budaya daerah maka harus ada upaya memelihara keberadaannya melalui pelaksanaan even budaya dan cagar budaya. Untuk mengetahui kekayaan seni dan budaya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-II.14
Jenis Kesenian dan Kepurbakalaan di Kabupaten Pacitan

NO	KESENIAN	JENIS
A	SENI TRADISIONAL DAERAH	
	1 Seni Fertunjukan Rakyat	Wayang orang
		Ketoprak
		Sandiwara
		Jaranan
		Tradisional / modern
	2 Sanggar seni	Tari
		Karawitan
		Rupa/lukis
		Etnik
		Modeling dan dekorasi
		Rias pengantin
	3 Seni Pedalangan	Wayang kulit
		Wayang beber
		Waranggono/sinden
	4 Musik tradisional	Oglor
		Slawatan
		Hadrah
		Campursari
B	SENI UNGGULAN	
		Upacara adat
		Tari Kethek Ogleng

NO	KESENIAN	JENIS
		Tari eklek
		Tari senthewere
C	KESENIAN NASIONAL	
		Orkes trelayu
		Orkes keroncong
		Band
D	KEPURBAKALAN	
		Bangunan museum
		Situs/prasejarah

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan

Indikator bidang kebudayaan pada fokus seni budaya dan olah raga ditunjukkan dengan jumlah grup kesenian, gedung kesenian dan seniman serta budayawan daerah yang dibina, sebagaimana tabel berikut:

Tabel.T-II.15
Indikator Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Bidang Kebudayaan
Tahun 2010 s/d 2014

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah grup kesenian	14	18	24	28	35
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	2
3	Jumlah Seniman dan Budayawan Daerah yang dibina	-	-	-	-	31

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan

Sedangkan dibidang olah raga perlu digali bibit-bibit olahragawan dan cabang olahraga daerah yang menonjol dan berprestasi untuk dikembangkan sehingga dapat mengangkat nama baik daerah. Untuk meningkatkan prestasi pemuda di daerah perlu dilakukan pembinaan dan ajang prestasi pemuda melalui even seleksi pemuda berprestasi. Sedangkan untuk meningkatkan prestasi olah raga dilakukan pembinaan melalui induk organisasi olah raga (KONI kabupaten) bekerja sama dengan organisasi persatuan olah raga yang ada di daerah. Dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan diharapkan akan muncul olahragawan yang berprestasi di daerah. Berikut ini disajikan indikator bidang pemuda dan olah raga pada fokus seni budaya dan olahraga:

Tabel.T-II.16
Indikator Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Bidang Pemuda dan
Olah Raga Tahun 2010 s/d 2014

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Klub Olahraga	72	80	80	137	137
2	Jumlah Gedung Olahraga	3	3	4	4	7

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi maka pelayanan birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan masyarakat menjadi isu utama.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri baik kedalam urusan wajib maupun pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Penyelenggaraan urusan wajib harus berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya pengembangan potensi unggulan yang menjadi kekhususan daerah.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya yang berkualitas ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Aspek layanan pada urusan pendidikan dapat dilihat dari pemerataan kesempatan pendidikan, kualitas pengajar, kurikulum sekolah dan fasilitas pendidikan yang ada pada suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM). Terpenuhinya SPM bidang pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan pelayanan dasar pendidikan. Berikut ini disajikan indikator urusan pendidikan yang menjadi tolok ukur pelayanan pendidikan di Kabupaten Pacitan:

Tabel T-II.17
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Urusan Pendidikan
Tahun 2010 s/d 2015

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendidikan Dasar:						
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (%)						
	Kelompok usia 7 - 12 tahun	101,16	100,57	99,99	99,99	99,99	99,99
	Kelompok usia 13 - 15 tahun	83,66	86,22	88,33	89,17	89,95	90,07
1.2	Rasio guru / murid						
	Di setiap SD/MI tersedia 1 orang guru untuk 32 orang peserta didik dan 6 guru untuk setiap satuan pendidikan dan untuk daerah khusus 4 orang guru setiap satuan pendidikan	-	77,25	80,96	88,27	94,81	99,42
	Di setiap SMP/MTS tersedia 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran dan untuk daerah khusus tersedia 1 orang guru untuk setiap rumpun mapel	-	84,65	87,72	90,6	93,44	97,56
2	Pendidikan Menengah						
2.1	Angka Partisipasi Sekolah (%)						
	Kelompok usia 16 - 18 tahun	56,05	67,59	67,89	69,10	70,82	70,91
2.2	Rasio guru / murid						
	SMA	1:20	1:13	1:13	1:14	1:20	1:14
	SMK	1:15	1:12	1:10	1:10	1:15	1:10
	MA	1:15	1:06	1:06	1:08	1:15	1:07
3	Fasilitas Pendidikan :						
3.1	Kondisi ruang kelas baik (%)						
	SD/MI	74,2	79,8	89,25	89,53	94,71	95,98
	SMP/MTs	71,04	87,14	87,58	88,34	93,34	94,71
	SMA/SMK/MA	73,13	86,32	89,1	88,31	91,21	92,81
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)						
	APK PAUD	41,2	50,3	52,07	52,54	57,85	63,02
5	Angka Putus Sekolah (%)						
	SD/MI	0	0	0,18	0,06	0	0
	SMP/MTs	0,49	0,22	0,66	0,56	0,26	0,19
	SMA/SMK/MA	0,94	1,22	0,98	0,79	0,31	0,22
6	Angka kelulusan (%)						
	SD/MI	99,98	100	100	99,4	100	100
	SMP/MTs	99,35	100,09	99,46	99,83	99,34	100
	SMA/SMK/MA	98,34	99,78	99,87	99,87	99,9	99,99
7	Nilai rata-rata ujian nasional (%)						
	SD/MI	6,79	7,73	7,22	7,43	7,46	7,52
	SMP/MTs	7,18	7,43	6,92	6,86	7,21	7,36
	SMA/SMK/MA	6,93	7,43	6,8	7,59	7,61	7,78

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
S	Angka melanjutkan (%)						
	Dari SD/MI ke SMP/MTs	99,93	99,85	100	100,88	100,23	100,27
	Dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	69,21	67,36	73,7	78,27	79,57	80,22
9	Guru yang memenuhi kualifikasi akademik (%)						
	SD/MI	69,4	78,31	79,07	82,8	86,64	87,78
	SMP/MTs	91,89	84,89	86,67	89,84	92,44	95,51
	SMA/SMK/MA	97,58	98,48	98,33	94,23	96,66	98,92
10	Guru yang bersertifikasi pendidik (%)						
	SD/MI	46,13	56,61	58,64	63,32	69,13	75,12
	SMP/MTs	38,36	52,13	52,18	55,24	70,15	76,92
	SMA/SMK/MA	61,63	62,31	62,35	65,42	78,24	86,11
11	Sekolah yang memiliki akreditasi minimal B (%)						
	SD	49,29	60,33	68,86	98,08	93,32	98,56
	SMP	81,82	83,07	84	84,51	88,89	90,28
	SMA	90	100	100	100	100	100
	SMK	50,7	52,94	65,4	66,67	67,53	71,8
12	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil						
	- SD/MI	0	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs	0	100	100	100	100	100
13	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang						
	SD/MI	0	90,45	91,54	93,27	97,12	99,04
	SMP/MTs	0	81,34	83,33	85,47	90,98	100
14	Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis						
	SD/MI	0	72,3	81,54	88,27	93,46	100
	SMP/MTs	0	75,9	76,32	82,91	90,16	100
15	Disetiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik	0	31,24	33,33	38,46	53,28	80,49
16	Di setiap SMP dan MTs minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	0	48,6	50,88	56,41	62,3	78,86
17	Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya						
	SD/MI	0	35,54	38,65	45,77	60,58	100
	SMP/MTs	0	67,15	75,44	80,34	83,61	97,56
18	Disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru	0	58,53	62,28	65,81	81,15	86,99
19	Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik SI atau D IV	0	94,24	98,27	99,62	100	100
20	Disetiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	0	71,45	85,77	95,38	95,77	98,27

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
21	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik SI atau D IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru; telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	0	59,35	65,79	67,52	75,41	90,24
22	Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik SI atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan	0	35,4	38,6	40,17	54,92	84,55
23	Di setiap kabupaten semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik SI atau DIV dan telah memiliki sertifikat	0	79,26	85,58	91,54	95	96,15
24	Di setiap kabupaten semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik SI atau DIV dan telah memiliki sertifikat pendidik	0	77,36	82,46	86,32	89,34	93,5
25	Di setiap kabupaten semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki klasifikasi akademik SI atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik						
	SD/MI	0	100	100	100	100	100
	SMP/MTs	0	100	100	100	100	100
26	Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu SP dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif						
	SD/MI	0	100	100	100	100	100
	SMP/MTs	0	100	100	100	100	100
27	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan						
	SD/MI	0	100	100	100	100	100
	SMP/MTs	0	100	100	100	100	100
28	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	0	55,36	62,69	70,96	100	91,54
29	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	0	44,28	50,88	59,83	71,31	87,8
30	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	0	34,32	25,58	35,58	73,27	94,81
31	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi						
	SD/MI	0	61,25	65,96	67,69	81,15	86,92
	SMP/MTs	0	40,29	46,49	50,43	70,49	87,8
32	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan						
	SD/MI	0	88,35	93,08	95,77	100	100
	SMP/MTs	0	61,58	67,54	73,5	100	100
33	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :						
	(a) Kelas I – II : 18 jam per minggu	0	97,86	98,08	98,27	100	100
	(b) Kelas III : 24 jam per minggu	0	97,86	98,08	98,27	100	100
	(c) Kelas IV – VI : 27 jam per minggu	0	97,86	98,08	98,27	100	100

NO	INDIKATOR	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(d) Kelas VII – IX : 27 jam per minggu	0	83,65	84,21	90,60	100	100
34	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku						
	SD/MI	0	99,67	99,81	99,81	100	100
	SMP/MTs	0	98,1	98,25	98,24	100	100
35	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya						
	SD/MI	0	97,68	98,46	99,04	100	100
	SMP/MTs	0	96,25	96,49	98,29	100	100
36	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik						
	SD/MI	0	98,62	98,85	99,42	100	100
	SMP/MTs	0	97,15	97,37	97,44	100	100
37	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester						
	SD/MI	0	96,85	97,5	98,85	98,95	100
	SMP/MTs	0	88,35	88,6	94,87	95,03	100
38	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik						
	SD/MI	0	99,14	99,42	99,42	100	100
	SMP/MTs	0	96,12	97,37	97,44	100	100
39	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester						
	SD/MI	0	99,14	99,81	99,81	100	100
	SMP/MTs	0	96,16	96,49	98,29	100	100
40	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)						
	SD/MI	0	99,1	99,23	99,42	100	100
	SMP/MTs	0	94,85	95,61	96,58	100	100
41	Cakupan masyarakat yang terlayani pendidikan kecakapan hidup & kewirausahaan masyarakat	0,332	0,341	0,375	0,402	0,443	0,462
42	Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan pendidikan (%)	0	0	30	37,5	42,3	47,24
43	Jumlah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat	52.498	53.603	60.424	89.261	99.246	104.232

Sumber: Bappeda Kab. Pacitan (diolah dari berbagai sumber)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat APS pendidikan dasar usia 7-12 hampir mencapai 100% yang berarti hampir semua anak usia 7-12 tahun berkesempatan mengenyam pendidikan dasar. Namun APS tahun 2015 (usia 13-15 tahun) sebesar 90,07% yang berarti masih ada sekitar 9,93% dari total anak pada usia tersebut yang belum berkesempatan mendapat pendidikan dasar. Akan

tetapi jumlah anak pada usia tersebut yang tidak/belum mendapat pendidikan dasar semakin berkurang. Hal ini dapat terlihat dari APS usia 13-15 tahun menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Begitu juga dengan APS pendidikan menengah (kelompok usia 16-18 tahun) yang meningkat setiap tahunnya dengan pencapaian 70,91% pada akhir tahun 2015.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah kelas dengan kondisi baik. Hal ini terlihat dari naiknya prosentase kondisi ruang kelas baik (point 3.1) mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.

Semakin tingginya kesadaran setiap penduduk untuk mendapat pendidikan yang lebih tinggi dapat dilihat dari menurunnya prosentase Angka Putus Sekolah. Angka putus sekolah menggambarkan murid yang tidak lagi melanjutkan sekolah karena alasan tertentu. Alasan paling menonjol murid tidak bisa melanjutkan sekolah biasanya adalah alasan ekonomi atau ketidak mampuan orang tua membiayai sekolah anaknya. Alasan yang lain adalah karena minat anak untuk bersekolah kurang karena faktor lingkungan sosial. Angka Putus Sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pacitan menunjukkan kondisi yang relatif baik. Hal ini juga didukung dari program Grindulu Mapan dimana pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan bantuan kepada siswa miskin. Program tersebut mampu menekan Angka Putus Sekolah serta meningkatkan jumlah kelulusan setiap tahunnya.

Perkembangan capaian angka kelulusan dari tahun 2010-2015 menunjukkan kecenderungan meningkat di tingkat SMA sederajat, mengalami kenaikan dan penurunan di tingkat SMP sederajat dan cenderung mengalami kenaikan di tingkat SD sederajat meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2013.

Dari tabel di atas menunjukkan capaian angka kelulusan di tingkat SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat selama kurun waktu 2010-2015. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa angka kelulusan di tingkat pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat sudah baik karena hampir mencapai 100% dan sudah 100% untuk tingkat SD sederajat. Dengan data seperti yang tercantum di atas maka capaian angka kelulusan yang tinggi ini perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

Kesehatan

Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif dan setiap individu berhak mendapat layanan kesehatan yang baik. Untuk mewujudkan masyarakat

yang sehat dan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah telah menetapkan urusan kesehatan sebagai urusan wajib. Berdasarkan amanat Undang-undang Kesehatan Nomor 39 Tahun 2009, tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat.

Capaian pembangunan kesehatan dari 2010-2015 dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini.

a) Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hidup). Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pacitan dari tahun 2010-2015 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2010 AKB Kabupaten Pacitan sebesar 12,38 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi 9,73 per 1.000 kelahiran hidup di pada tahun 2015.

Angka Kematian Balita (AKBa) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa dihitung berdasarkan jumlah kematian balita 0-5 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKBa di Kabupaten Pacitan dari tahun 2010-2015 fluktuatif, pada tahun 2010 sebesar 0,64 per 1.000 kelahiran hidup, naik menjadi 0,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015.

b) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Kabupaten Pacitan selama lima tahun (2010-2015) mengalami kondisi yang fluktuatif dengan tren menurun, pada tahun 2010 AKI sebesar 128,29 per 100.000 kelahiran hidup kemudian pada tahun 2015 angkanya sudah mampu mencapai angka 91,19 per 100.000

kelahiran hidup. Angka tersebut masih belum bisa mencapai target MDGs (82,12 per 100.000 kelahiran hidup).

Salah satu upaya penurunan kasus kematian ibu adalah melalui memberikan pelayanan yang optimal kepada ibu hamil dan ibu melahirkan. Pelayanan kepada ibu hamil antara lain melalui pemeriksaan rutin selama proses kehamilan. Cakupan pelayanan antenatal (K4) di Kabupaten Pacitan sudah cukup baik. Pada tahun 2015 cakupan pelayanan antenatal (K4) sudah mencapai 94%. Selain pemeriksaan kepada ibu hamil, upaya lain dalam rangka mengurangi AKI adalah melalui pertolongan pada persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih. Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di Kabupaten Pacitan tahun 2015 sudah mencapai 99%.

c) Rasio Posyandu per satuan Balita

Jumlah posyandu di Kabupaten Pacitan pada tahun 2014 sebanyak 812 unit Posyandu dengan kategori purnama dan mandiri. Rasio posyandu per satuan balita menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2010 rasio posyandu dengan balita sebesar 21,53 per 1.000 balita meningkat pada tahun 2015 menjadi 23,11 per 1.000 balita.

d) Rasio Tenaga Kesehatan

Selain sarana kesehatan, faktor penunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan atau dokter. Rasio dokter persatuan penduduk 2010 sebesar 0,17 pada tahun 2013 sebesar 0,19 dan tahun 2015 0,21 yang tersebar di 12 puskesmas dan RSUD Kabupaten Pacitan.

e) Penyakit Menular

Penemuan pasien baru TB BTA positif di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 cukup tinggi, kasusnya mencapai angka 24,58 per 100.000 penduduk, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu di tahun 2010 sebesar 25,38 meningkat menjadi 40,75 pada tahun 2015. Dan untuk Angka kesakitan malaria per 1000 semakin menurun dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2010 sebesar 1,16 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2015 sebesar 0,14

f) Rasio sarana kesehatan per satuan penduduk

Jumlah puskesmas di Kabupaten Pacitan sebanyak 24 unit dan 54 puskesmas pembantu. Sedangkan jumlah rumah sakit di Kabupaten Pacitan berjumlah 3 unit.

Kinerja pelayanan kesehatan rujukan dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data kinerja RSUD daerah, indikator